

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DESA
TEMBALAE KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DESA
TEMBALAE KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2020

Oleh:

MUHTARDIN
NIM: 217130047

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

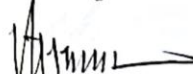
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi
Mataram, 21 Juli 2021

Pembimbing I



Drs. Amil MM
NIDN. 0831126204

Pembimbing II



Azwar Subandi, S.IP., M.H
NIDN. 0818018101

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Avatullah Hadi, S.IP., M. IP

NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DESA
TEMBALAE KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2020

Oleh:
MUHTARDIN
NIM: 217130047

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan didepan penguji Skripsi Pada Tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

- | | | |
|---|----|---------|
| 1. <u>Drs. Amil, MM</u>
NIDN. 08311262204 | PU | (.....) |
| 2. <u>Azwar Subandi, S.IP., M.H</u>
NIDN. 0818018101 | PP | (.....) |
| 3. <u>Drs. Mustamin H. Idris., MS</u>
NIDN. 0831126484 | PN | (.....) |

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 08160579202

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali., M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : MUHTARDIN


NIM : 217130047

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), Baik di tingkat Universitas Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada saya, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Mataram, 21 Juli 2021


10000
METERAI
TEMPEL
8145BAJK350450286
MUHTARDIN
NIM: 217130047



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHTARDIN
NIM : 217130017
Tempat/Tgl Lahir : Panggajene, 17 Maret 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FLSIPOL
No. Hp/Email : muhtardin99@gmail.com / 082-147-037628
Judul Penelitian :-

Participasi Masyarakat dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa Tembale
Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 5 Agustus 2021

Penulis



6000
NAMA MELUKAIKAN
Muhtardin
NIM. 217130017

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHTARDIN.....
 NIM : 217130047.....
 Tempat/Tgl Lahir : Panggo 17 Maret 1999.....
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan.....
 Fakultas : P&Sipol.....
 No. Hp/Email : muhtardingg@smml.com / 082.197.037.628
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan
 Pembangunan (MUSREMBANG) Desa Tembale Kecamatan
 Paso Kabupaten Dompu Tahun 2020

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

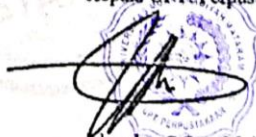
Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 5 Agustus 2021

Penulis

 Muhtardin
 NIM. 217130047

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

**“SELAMA ADA NIAT, KEYAKINAN SERTA USAHA SEMUA AKAN
MENJADI MUNGKIN”**

(MUHTARDIN)

SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN

(Al Quran Surat Al- Isyirah: 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya ayahanda Lukman yang telah berjuang tak pernah lelah dalam menafkahi keluarganya. Kerja pagi, siang, malam beliau lakukan supaya kami bisa hidup berkecukupan dan agar kami anak-anaknya bisa bersekolah untuk mencari ilmu serta buat ibunda tercinta ST. Nur yang telah merawat, membesarkan kami anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan yang selalu memberikan do'a dukungan kepada saya serta menjadi penyemangat dalam menyusun skripsi ini
2. Kedua kakak saya Novitasari S.pd yang selalu menjadi penyemangat di kala sedih, serta abangda Safriansa yang selalu memberikan masukan serta arahnya dalam setiap permasalahan.
3. Untuk kedua teman baik saya Muh. Naser yang selalu membantu dalam setiap urusan serta saudari Nurfagiana yang selalu mendukung serta menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
4. Keluarga Himpunan Mahasiswa Pajo Mataram yang selalu menjadi tempat terbaik dalam berproses serta yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Keluarga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang sangat banyak membantu serta menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020 ”** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, Nabi akhiruzaman yang telah membawa manusia dari zaman zahiliah, zaman yang penuh dengan kebiadapan menuju zaman yang beradap hingga saat ini. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses menyelesaikan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang peneliti hadapi dalam menyelesaikan Skripsi. Peneliti menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan akademik maupun menyelesaikan Skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan kelancaran kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
2. Kepada Kedua Orang tua yang selalu mendo,akan dan mendukung sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi
3. Bapak Dr. H. Arsyat Abdul Gani,. M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali,. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP,. M.IP Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas

Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti.

6. Bapak Drs. Amil MM selaku dosen pembimbing I Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Azwar Subandi, S.IP., M.H selaku dosen pembimbing Skripsi ke II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan peneliti selama menyusun Skripsi dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan staf di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama peneliti kuliah di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Kepada kedua kakak saya yang telah memberikan semangat serta masukan untuk menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya pada pemerintah Desa Tembalae dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Mataram, 21 Juli 2021



MUHTARDIN

NIM : 217130047

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DESA
TEMBALAE KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020**

Muhtardin¹, Azwar Subandi², Amil³
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2020 di Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu serta apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana cara yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, menjelaskan, menganalisis serta mengumpulkan data dari objek yang sedang diteliti, dalam hal ini tehnik yang digunakan yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan kepada pihak yang dianggap penting. Jadi data penelitian ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Tembalae, Sekertaris Desa, Ketua BPD, 2 Staf Desa dan 4 tokoh masyarakat serta 5 tokoh pemuda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tembalae tahun 2020 sudah ada namun belum maksimal di sebabkan karena pemerintah Desa Tembalae belum sepenuhnya melibatkan semua elemen masyarakat ditambah dengan hambatan dari kurangnya kesadaran, tingkat pendidikan masyarakat, kesibukan dan dampak pandemi covid 19 serta masih kurangnya komunikasi dari pemerintah Desa Dembalae kepada masyarakat. Adapun untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020, pemerintah Desa Tembalae harus mensosialisasikan terlebih dahulu dengan masyarakat mengenai kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tembalae Tahun 2020, pemerintah Desa Tembalae harus mengundang semua elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dan pemerintah Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu juga dalam hal penetapan hari pelaksanaan musrembangdes tidak bertepatan dengan kesibukan masyarakat dengan aktivitas pekerjaan supaya masyarakat yang hadir lebih banyak saat musrembangdes serta masyarakat Desa Tembalae juga harus menyadari akan pentingnya menjalin komunikasi, berpartisipasi dan berkerja sama dalam perencanaan serta penetapan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

Kata Kunci: Partisipasi, Perencanaan

**PEOPLE PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT PLANNING
CONSULTATION (MUSREMBANG) OF TEMBALAE VILLAGE, PAJO,
DOMPU IN 2020**

Muhtardin¹, Azwar Subandi², Amil³

Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

This study intends to determine the amount of community engagement in the development planning process in 2020 of Tembalae Village, Pajo, Dompus, West Nusa Tenggara Province. This problem of the research are; how is community engagement in the implementation of development planning discussion (Musrembang) and what are the constraining factors in the implementation of development planning deliberation (Musrembang) in Tembalae Village, Pajo, Dompus?. This is a descriptive qualitative study, which means that the strategy for solving a problem is to gather, compile, explain, analyze, and collect data from the object being examined; in this case, the technique is to interview persons who are regarded important. The data was obtained from interviews with the Tembalae Village Head, Village Secretary, BPD Chair, 2 Village Staff and 4 community leaders and 5 youth leaders. The findings of this study show that community participation in the 2020 Tembalae Village development planning process already exists but has not been fully realized due to obstacles such as lack of awareness, education level, busyness, and the impact of the COVID-19 pandemic, as well as a lack of communication from the Tembalae Village government. In order to increase community engagement in the Tembalae Village development planning debate in 2020, Pajo, Dompus Regency, the Tembalae Village government must first socialize with the community regarding the 2020 Tembalae Village development planning deliberation activities, the Tembalae Village government must invite all members of society, including religious leaders, community leaders, and youth leaders, as well as the government of Tembalae Village, Pajo, Dompus, in terms of determining the day of the musrembangdes implementation so that it does not conflict with the community's busy schedule. It affected on more people attend the musrembangdes, and the inhabitants of Tembalae village recognize the necessity of creating communication, participating, and cooperating in the Tembalae Village, Pajo, Dompus development planning deliberation.

Keywords: *Participation, Planning*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK... ..	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Partisipasi	15
2.2.1 Definisi Partisipasi	15
2.2.2 Partisipasi Masyarakat	15
2.3 Desa.....	19
2.3.1 Definisi Desa.....	19
2.3.2 Konsep Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa	20
2.3.3 Musyawarah Pembangunan	22

2.3.3.1 Pra Musbang	22
2.3.3.1 Musbang	23
2.4 Perencanaan.....	23
2.4.1 Definisi perencanaan.....	23
2.4.2 Perencanaan Pembangunan.....	24
2.5 Kerangka Berfikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Tehnik Penentuan Infoman	29
3.4 Sumber Data.....	30
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	30
3.5.1 Observasi.....	30
3.5.2 Wawancara.....	30
3.5.2 Dokumentasi	31
3.6 Tehnik Analisa Data.....	31
3.6.1 Reduksi data.....	32
3.6.2 Penyajian Data	32
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Sejarah Desa Tembalae	34
4.1.2 Kondisi Geografis Desa Tembalae	35
4.1.3 Demografis.....	36
4.1.4 Visi Misi Desa Tembalae	41
4.1.5 Stuktur Organisasi Desa Tembalae	43
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
4.2.1 Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu	44
4.2.2 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu	55

4.2.2.1 Kurangnya Kesadaran dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	56
4.2.2.2 Dampak Pandemi Covid 19.....	57
4.2.2.3 Kesibukan Masyarakat Desa Tembalae	58
4.2.2.4 Kurang adanya Komunikasi Pemerintah Desa Tembalae kepada Masyarakat	58
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Penyebaran Penduduk Desa Tembalae	37
Tabel 4.2 Kelompok Umur Masyarakat Desa Tembalae	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Tembalae	39
Tabel 4.3 Perpindahan Penduduk Desa Tembalae	39
Tabel 4.4 Pendidikan Masyarakat Desa Tembalae	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Dokumentasi Penelitian66



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir.....	27
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tembalae	42



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian.....	66
2. Lembar Konsultasi Skripsi	72
3. Berita Acara Ujian.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya orang akan menginginkan sebuah kehidupan yang sempurna dan lebih baik di setiap harinya. Istilah-istilah tersebut akan dapat menggambarkan pemenuhan segala bentuk kebutuhan di masyarakat. Syaratnya jangan khawatir memikirkan hari esok. Kondisi yang memberikan situasi yang menguntungkan untuk realisasi diri dan pencapaian proses hubungan sosial yang adil. Realitas yang kemudian dianggap sebagai masalah sosial akan selalu mendorong atau mengilhami munculnya upaya perubahan atau perbaikan bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di desa. Strategi pembangunan desa adalah meningkatkan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal.

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai input dan output, proses partisipasi dapat dikategorikan menjadi beberapa tahapan, yaitu mulai dari menerima informasi, menanggapi informasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan dapat sebagai saluran atau input. Sedangkan output atau keluaran adalah suatu proses yang dihasilkan dari apa yang telah dilakukan oleh masyarakat.

Landasan hukum dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Presiden Suharto sejak tahun 1966 menerapkan konsep partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan sesuai dengan paradigma pemerintah orde baru yang sentralistik, seluruh kebijakan pembangunan dilakukan secara “*top-down*”.

Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dikemukakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 206 menyebutkan tentang kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diserahkan pengaturannya kepada desa, bantuan dari pemerintah provinsi atau bantuan pemerintah kabupaten/kota kepada desa di sertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan urusan pemerintah lainnya oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Bila dilihat dari undang-undang tersebut bahwa dapat dijelaskan desa mempunyai hak dalam mengelola, menyelenggarakan, mengatur dan membuat peraturan dengan mengikut sertakan masyarakat yang ada di desa tersebut. Hal ini diperkuat oleh undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa “pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”.

Dalam pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa “pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam pasal 114 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa (1) perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa; (2) musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan juni tahun anggaran berjalan. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 114 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 bahwa “perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM desa RKP desa dan daftar usulan RKP desa.

Berkaitan dengan upaya pembangunan desa, peran serta masyarakat memegang peranan penting karena pembangunan desa sebenarnya bertujuan untuk memajukan desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya yang ada. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa dimulai dari menerima informasi tentang perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan program. Dengan peran serta masyarakat, hasil pembangunan yang dilaksanakan diharapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan adalah suatu proses pencapaian cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan merata di seluruh Indonesia, namun pembangunan yang menjadi dasar untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan merata tidak dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata. Untuk mengatasi permasalahan pembangunan khususnya di desa, pengembangan peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan saat ini sehingga pembangunan selanjutnya yang akan dilakukan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya

Pembangunan desa ke depan akan semakin menantang dengan keadaan masyarakat yang menyadari dan menginginkan pentingnya pembangunan daerah dalam kehidupan mereka, baik dari sisi perekonomian daerah yang semakin terbuka maupun kehidupan politik yang lebih demokratis. Namun desa ini belum beranjak dari citranya yang lama, terbelakang dan miskin. Meskipun banyak orang mengakui bahwa desa memiliki peran besar di kota, desa masih dipandang rendah dari segi ekonomi atau sebaliknya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama dalam semua rencana strategis dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, kesenjangan antara kota dan pedesaan akan semakin besar, terutama dalam hal ekonomi

Pembangunan yang baik akan terlaksana jika dimulai dengan perencanaan yang baik, sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu dalam proses perencanaan memerlukan peran serta masyarakat, diantaranya dengan

melakukan musyawarah perencanaan pembangunan. Pentingnya kegiatan musyawarah dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan mengenai program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah.

Dengan melakukan musyawarah, masyarakat akan dapat ikut andil dalam menentukan suatu program pembangunan secara bersama dengan mewujudkan suatu kepentingan yang dapat dinikmati. Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian dari pada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Tjokroamidjojo dalam (Basom Frianto Wibowo 2015:3) bahwa, Perencanaan dalam arti luas tidak lain adalah suatu proses penyusunan sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara untuk bagaimana mencapai tujuan yang sebesar-besarnya dengan sumber daya yang ada agar seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan dapat dilakukan di berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan rencana pembangunan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan, pemerintah berperan sebagai mesin pembangunan, dan hal ini terkait dengan pengertian perencanaan dan merupakan upaya lembaga publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilaksanakan disuatu daerah, di tingkat negara bagian dan teritori, atas dasar kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah yang mempunyai wilayah kekuasaan.

Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang direpresentasikan dalam upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu. Ciri-ciri yang bersangkutan adalah perencanaan yang memuat upaya pemenuhan kepentingan masyarakat dengan pemerataan pembangunan. Dalam proses pelaksanaannya, pelaksanaan pembangunan akan menemui kendala dari pihak

pelaksana dan masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu. Perencanaan merupakan sebuah tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah segala proses pembangunan telah selesai dilaksanakan.

Proses pengembangan yang dilakukan tentunya memiliki keterbatasan waktu implementasi, biaya dan ruang lingkup implementasi. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat terpantau oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali dari masyarakat. Mencermati penjelasan perencanaan dalam pembangunan desa, dapat dikatakan bahwa pentingnya perencanaan yang baik adalah seperti perjalanan yang sudah setengah jalan karena selebihnya tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Jika pelaksanaannya konsisten, pengendaliannya efektif, dan faktor-faktor yang mengganggu sedikit atau tidak ada bias dalam pelaksanaan pembangunan, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan tinggal menunggu waktu untuk mencapai tujuannya. Bahkan negara-negara besar masih menghadapi berbagai masalah pembangunan yang harus diselesaikan secara bertahap.

Ada berbagai alasan sebagai motif perencanaan seperti prevalensi kemiskinan, perbedaan kepentingan, sumber daya yang terbatas, sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pembangunan yang baik akan terlaksana jika dimulai dengan perencanaan yang baik, sehingga dapat dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa. Untuk itu, proses perencanaan memerlukan peran serta masyarakat, termasuk melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pelaksanaan Musrenbang di desa meliputi tahap persiapan, pembahasan dan perumusan prioritas program atau kegiatan, penyusunan kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca desa.

Musrenbang merupakan sebuah mekanisme perencanaan dan institusi perencanaan yang ada di daerah serta sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*). Musrenbang adalah sebuah usaha

yang benar-benar menjadi sebuah wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat serta bagaimana pemerintah merespon semua masalah tersebut.

Idealnya dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa akan melibatkan semua elemen masyarakat, pemerintah dan pihak yang berkepentingan dimulai dari pada tahapan proses, penentuan dan pelaksanaan termasuk *stakeholder* secara bersamaan memikirkan bagaimana untuk membiayai dan mengimplementasikan hasil dari pada musrembang. Hal ini biasanya terjadi manakala pemerintah benar duduk secara bersama dan setara dalam hal memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan. Melihat dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa perencanaan adalah faktor yang paling utama dalam setiap proses pembangunan desa yang lebih baik. Perencanaan dapat menjadi sebuah faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan yang ada di desa, apabila terciptanya suatu perencanaan yang baik dalam menentukan suatu program pembangunan yang tepat, maka setiap pelaksanaan pembangunan sudah dapat dilaksanakan dengan sangat baik pula.

Berkenaan dengan perencanaan dalam pembangunan desa, peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam merencanakan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan mengingat hanya masyarakat setempat yang lebih mengetahui berbagai jenis masalah dan potensi sumber daya yang ada dalam rangka untuk memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan peran serta masyarakat, hasil pembangunan yang dilaksanakan diharapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Keterlibatan langsung masyarakat secara aktif pada perencanaan akan memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif pembangunan yang secara langsung bersumber dari pada masyarakat. Dengan penerapan perencanaan partisipatif ini kemungkinan akan dapat membuka cakrawala berpikir masyarakat atau pelaku pembangunan desa untuk menemukan apa saja masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki sehingga tumbuh kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi desa untuk

dirumuskan pada perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalea.

Proses kegiatan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila seluruh lapisan masyarakat mulai dari lapisan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda serta dari aparat pemerintahan desa berpartisipasi dan bekerja sama dengan baik demi tercapainya tujuan bersama. Pentingnya persatuan dan kerjama secara bersama-sama dalam merencanakan dan menentukan suatu program-program pembangunan yang akan dilakukan di suatu daerah untuk mencapai tujuan bersama sehingga akan dapat dinikmati oleh semua kalangan baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.

Saharuddin dan Sumardjo (2003:57.58) secara sederhana menyatakan bahwa partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang secara sadar diinginkan oleh pihak yang berkepentingan. Partisipasi dalam pengembangan masyarakat melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan penikmatan hasil atau upaya perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan masyarakat.

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa seseorang akan berpartisipasi jika prasyarat partisipasi terpenuhi, yaitu (1) peluang, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang dirasakan memiliki peluang untuk berpartisipasi. (ii) Keinginan, merupakan sesuatu yang kemudian akan mendorong/mengembangkan kreatifitas serta sikapnya sehingga termotivasi untuk berbagi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan dari keikutsertaannya, dan (iii) kemampuan, kesadaran atau keyakinan dalam diri yang dimilikinya berupa kemampuan dalam berbagi, dapat dalam berupa sebuah tenaga atau pikiran, serta waktu atau sarana/prasarana.

Berkaitan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Saharuddin dan Sumardjo mengenai partisipasi masyarakat serta peran pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan, hal ini akan membuktikan bahwa betapa pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam upaya untuk merumuskan suatu perencanaan

pembangunan secara bersama dengan pemerintah. Namun, hal tersebut akan terwujud apabila pemerintah memberikan kesempatan atau ruang yang cukup bagi masyarakat untuk terlibat secara pasif ataupun aktif dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dirumuskan secara bersama antara semua pihak yaitu masyarakat dengan pemerintah.

Selain partisipasi masyarakat yang harus dilibatkan dalam setiap perencanaan dan pembangunan, pemerintah juga sangat memegang peranan penting dalam proses pembangunan, di negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah lebih penting lagi terutama dikarena kebanyakan masyarakat masih harus dibangun prakarsa dan kemampuannya untuk terlibat secara efektif didalam pembangunan. Tingkat pendidikan rata-rata penduduk yang masih lumayan rendah, sistem politik yang belum cukup membangun dan member ruang kepada penyaluran kemampuan masyarakat adalah beberapa alasan masih lemahnya posisi masyarakat dalam pembangunan.

Sementara itu, pemerintah akan dianggap memiliki sejumlah kemampuan antara lain seperti keahlian, pengetahuan, kekuasaan, sistem, teknologi dan sebagainya. Oleh sebab itulah dengan kemampuan yang dimilikinya, pemerintah sangat diharapkan mampu mengambil peran penting dalam pembangunan, termasuk dalam hal menggerakkan dan memberikan ruang kepada partisipasi dan perkembangan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kemudian pembangunan pada masyarakat desa dapat diupayakan secara bersama-sama oleh pemerintah (pemerintah desa) dan masyarakat setempat. Sehingga apa yang menjadi masalah pembangunan yang masih merupakan salah satu permasalahan penting di tingkat desa akan dapat ditangani secara bersama oleh pemerintah dan semua unsur komponen masyarakat yang ada di desa.

Penelitian ini akan sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan hambatan dalam melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Tahun 2020. Permasalahan mendasar ketika pemerintah dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu

ialah kurang mengikut sertakan pemuda dan masyarakat didalam mengikuti musyawarah rencana pembangunan didesa, sehingga output dari pada hasil musyawarah tidak berjalan dengan semestinya untuk meningkatkan kualitas pembanguna di desa, pemerintah hanya melibatkan orang-orang yang sudah tua atau sesepuh (umur 50 keatas) yang kurang memberikan gagasan- gagasan untuk membangun, mereka hanya sebagai formalitas dalam musyawarah desa, sehingga apa yang pemerintah desa putuskan dalam hasil musyawarah menjadi hasil akhir tanpa ada masukan dan kritikan. Selain itu juga masih acuh tak acuhnya masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan.

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul: **“Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan dan di paparkan di atas, maka akan dapat dirumuskan sebuah masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Adapun manfaat rencana penelitian ini ialah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru dan sebagai referensi bagi mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b) Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini di harapkan sebagai landasan bagi pemerintah desa Tembalae untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan desa.

1.4.3 Manfaat Akademik

Secara akademik penelitian akan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b) Dapat menambah wawasan bagi peneliti dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam proses penelitian.
- c) Pengembangan ilmu pengetahuan dengan karya penelitian baru yang dapat mendukung kerja dari pemerintah desa.
- d) Bagi pembaca, agar dapat mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

1	Penelitian oleh Zoebir	<p>Zoebir Tahun 2012 tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah (Identifikasi Indikator-indikator Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat)”. Peraturan pembangunan semestinya tertuju pada masyarakat, itu tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat pada serangkaian penyusunan beberapa aturan di daerah, mesti didukung oleh aparat pemerintah (daerah) sebagai upaya yang baik dalam memobilisasi diri masyarakat yang lebih ketat terhadap kepatuhan dan pelaksanaan dari pada hukum itu sendiri. Sehingga upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan penduduk pada peraturan daerah. Keyakinan di dalam diri aparatur daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan segala bentuk dalam penyusunan peraturan di daerah baik itu di kota maupun kabupaten. Kemudian masalah utama yang dihadapi ialah bagaimana caranya agar bisa dilakukan dalam bentuk yang nyata di kehidupan bermasyarakat. Usaha- usaha yang dilakukan tersebut memang tidak akan mudah diwujudkan seperti membalikan telapak tangan tetapi dibutuhkan waktu yang lama dengan proses memakan waktu serta tenaga dan pikiran yang terkuras. Hal tersebut hanya akan bisa dilakukan oleh pemerintah yang memiliki hati yang ikhlas serta yang memiliki pengetahuan yang lebih. Faktor terpenting dalam</p>
---	---------------------------	--

		<p>keberhasilan menentukan pembangunan didaerah ialah adanya kesadaran dari semua lapisan masyarakat untuk ikut andil dalam merencanakan dan menetapkan sebuah kebijakan ataupun program kerja sehingga kebijakan yang diputuskan akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Masyarakat di tuntut untuk sadar bahwa keikutsertaan mereka di setiap proses pembangunan dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan, jadi masyarakat juga akan mengetahui bahwa mereka juga bisa ikut terlibat dalam pelaksanaan program kerja tersebut serta akan ada timbal balik dari pada apa yang di rumuskan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat.</p>
2	<p>Penelitian oleh Fathurrahman</p>	<p>Fathurrahman Fadil Tahun 2013 tentang “Partisipasi Masyarakat pada Musrembang Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru”. Partisipasi ialah sebuah relasi yang ada dalam kekuasaan baik itu persoalan sosial, ekonomi maupun politik yang diperintahkan oleh sistem demokrasi. Pada negara yang menganut sistem demokrasi bahwa ada kalanya pemerintah ikut turun langsung dalam menangani masyarakatnya dan ada kalanya pemerintah memberikan ruang kepada otoritas setempat yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi tergantung pada kondisi dan situasi. Masyarakat ialah sekelompok manusia yang memiliki satu kesatuan, keterikatan antara satu dengan yang lainnya sehingga akan</p>

		menimbulkan rasa kepedulian antar sesama baik itu dalam budaya, ekonomi, sosial dan lain-lainnya.
3	Penelitian oleh Ahmad Mustamin	<p>Penelitian yang dilakukan Ahmad Mustamin Tahun 2017 tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Musrembang di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang”.</p> <p>Partisipasi dari masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat pada setiap pembangunan dari proses perencanaan serta pelaksanaan setiap program kerja yang di laksanakan di masyarakat. Sedangkan Sedangkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi masyarakat ialah sebuah aktivitas yang mengikutsertakan perasaan dan emosional seseorang dalam proses pembuatan keputusan dan melaksanakan tanggung jawab dalam suatu organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Konsep partisipasi, dalam perkembangannya, memiliki pengertian yang beragam walaupun dalam beberapa hal memiliki persamaan. Pada konsep pembangunan, pendekatan dalam partisipasi kurang lebih memiliki tiga makna. Pertama, bahwa partisipasi ialah sebuah kontribusi yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi pembangunan dengan upaya mempromosikan serta pembedayaan. Kedua partisipasi ialah instrumen untuk mencapai tujuan. Ketiga, partisipasi di artikan sebagai sebuah kondisi dimana semua pihak yang berkepentingan dari masyarakat, birokrasi, LSM serta aktor yang lainnya ikut terlibat langsung dalam setiap program partisipasi yang kemudian melibatkan semua pihak.</p>

4	Merry agustin	<p>Penelitian ini yang telah dilakukan pada tahun 2016 tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrebangng Studi Kasus Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan” bahwa partisipasi masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam segala pembangunan yang meliputi kegiatan perencanaan dan pembangunan. pelaksanaan program-program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi mendukung keberhasilan program yang ditawarkan oleh pemerintah. Program Pembangunan Jalan Poros Desa di Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yaitu dengan akses jalan.</p>
5	Tikka Dessy dan yuta Lilasari	<p>Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 tentang peran musyawarah perencanaan pembangunan dan tata kelola perekonomian Desa Pulongdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Bahwa perencanaan pembangunan di desa Pulongdowo dimulai dengan proses menghimpun aspirasi dari masyarakat desa yang kemudian di sampaikan kepada badan permusyawaratan desa sebagai wakil dari masyarakat yang ada di desa yang kajiannya membahas tentang kondisi wilayah serta keluh-keluhan masyarakat.</p>

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksudkan oleh peneliti, yakni keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan memberikan sumbangan ide terhadap setiap proses pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subyek

sekaligus sebagai objek pembangunan yang mengetahui bentuk kondisi didaerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang nantinya dilakukan didaerah mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan.

2.2 Partisipasi

2.2.1 Definisi Partisipasi

Partisipasi merupakan proses ikut serta individu masyarakat dalam kegiatan kelompok serta ikut memberikan masukan atau sumbangsi dalam bentuk apapun terhadap kegiatan yang dilakukan agar dapat menghargai pembangunan yang sedang dilakukan. Andi Uceng dkk (2019:22). Dalam realitisnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha didalam mendukung program pembangunan. Sedangkan menurut A. Mustanir dan Partisan Abadi (2017:249) menegaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan memetik suatu hasil atau suatu manfaat pembangunan adalah suatu partisipasi yang nyata.

Berdasarkan penjelasan diatas maka partisipasi yang kemudian dimaksud adalah keikutsertaan/ keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan memeberikan sumbangan ide terdahap proyek pembangunan yang dilaksanakan, dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subyek sekaligus objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi didaerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan.

2.2.2 Partisipasi Masyarakat

Isbandi dalam (Dea devita 2013:382) mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan pengambilan keputusan mengenai solusi untuk menyelesaikan masalah, pelaksanaan upaya untuk mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

suatu wilayah menjanjikan suatu proses yang bersifat kolaboratif dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama (*common goals*), terlibat di dalam pengambilan keputusan kolektif, menciptakan ruang, dimana ruang ini merupakan tempat untuk mengekspresikan keinginan mereka.

Konsep perencanaan dan desain pembangunan wilayah, partisipasi dilihat sebagai persyaratan untuk mendukung proses demokratisasi. Semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dan penghidupannya. Dalam bentuknya yang ideal, partisipasi dalam perencanaan dan desain pembangunan wilayah bukan hanya merupakan hak, tetapi sudah merupakan suatu aksi demokratis. Untuk memahami teori partisipasi dalam perencanaan pembangunan, Arnstein merumuskan suatu jenjang atau tingkat partisipasi sesuai dengan peran dan fungsi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta kontrol aktivitas pembangunan di wilayahnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat setempat yang lebih mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah kebijakan, berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Rahardjo Adisasmita (2006:34) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah ketelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang di kerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang bersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang di butuhkan sangat banyak, sehingga perlu melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pembangunan program pembangunan.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien baik dari; (a) aspek masukan atau input sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi; (b) dari aspek proses pelaksanaan, monitoring dan pengawasan; (c) dari aspek keluaran atau output, pencapaian sasaran, efektifitas dan efisiensi. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan di upayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana atau program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Partisipasi ialah melibatkan lebih banyak mental dan emosi dari pada fisik seseorang sehingga pribadi diharapkan lebih banyak terlibat dari pada fisiknya sendiri. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi yang demikian itu disebut sebagai partisipasi sukarela. Sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong orang untuk ikut bertanggung jawab

didalam suatu kegiatan, karena apa yang disumbangkannya adalah atas dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa tanggung jawab kepada organisasi. (Dea Deviyanti, 2013:382).

“Seorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya”. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu:

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental, perasaa, atau semata-mata hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Berdasarkan uraian di atas bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut didalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagai identitas, kepentingan-kepenting yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. Ada beberapa fungsi masyarakat yaitu penyediaan dan pendistribusian barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan, keamanan publik, sosialisasi, wadah pendukung atau gotong royong dan kontrol sosial. Menurut Rustian Kamaluddin dengan berpartisipasi masyarakat secara aktif dalam forum musrembang, masyarakat mampu menyampaikan aspirasi mereka dan masalah mereka sendiri sebagai orang yang terlibat dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Menumbuhkan kesadaran diri dan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbag, setidaknya masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi berperan sebagai penyampai aspirasi dan perencana pembangunan juga.

Adanya partisipasi masyarakat yang baik dalam pelaksanaan musrembang desa maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk hasil kerjasama antara pihak masyarakat dengan pemerintah, yang saling mempercayai, saling terbuka, adanya tujuan bersama, sehingga akan terbentuk sistem sosial yang kokoh, yang akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari musrenbag dapat diterima semua pihak.

Berdasarkan jenis partisipasi yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dapat berupa sumbangan pemikiran baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaannya, keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tenaga dalam pelaksanaan pembangunan, harta dan uang yang dapat digunakan untuk membantu dan membiayai pembangunan yang dilaksanakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah. Namun, hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh masyarakat adalah untuk mencapai pembangunan yang baik dengan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan atau program-program pembangunan dengan bekerja sama dengan baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

2.3 Desa

2.3.1 Definisi Desa

Secara Etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perpektif geografis, desa atau *village*, yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shof in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten.

Menurut widjaya HAW dalam (Cut Mafzatun dkk 2017:36) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 1, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia (NKRI).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Tujuan dibentuknya suatu desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintahan secara berdaya dan berhasil guna untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

2.3.2 Konsep Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 206 menyebutkan tentang kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diserahkan pengaturannya kepada desa, bantuan dari pemerintah provinsi atau bantuan pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Bila kita melihat urusan pemerintahan yang dikelola oleh desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa desa berhak menyelenggarakan, mengatur dan membuat kebijakan dalam membangun desa. Kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat

memiliki kewenangan dan legitimasi yang cukup kuat untuk membawa desanya ke arah yang dikehendakinya.

Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan desa untuk kemajuan desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, disusunlah rencana pembangunan desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan perdesaan disusun sebagaimana dimaksud oleh pemerintah desa dan peran serta seluruh masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi dengan membentuk suatu kerjasama untuk mensejahterakan masyarakat karena pemerintah dan masyarakat desa merupakan dua pihak yang harus ikut serta dalam pembangunan desa.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, ada beberapa hal yang harus kemudian diketahui dan menjadi langkah awal pemerintah desa untuk memajukan pembangunan desa yaitu: pemerintah desa sebagai perencana dan masyarakat sebagai pelaksana harus mengetahui konsep dalam pembangunan desa, selama ini perencana dan pelaksana hanya mengetahui pembangunan pedesaan adalah kemauan semua masyarakat untuk mendukung secara mutlak program-program yang dibuat pemerintah desa dengan segala tujuannya, artinya salah yang satu sistem pasif, seharusnya pembangunan desa adalah kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan hasil dari pada pembangunan, kedua sistem sama-sama aktif, pemerintah desa harus mengubah persepsinya terhadap pembangunan desa, sehingga dinamika dalam pembangunan yang ada didalam masyarakat menjadi berkembang, pemerintah desa harus mempunyai sikap toleransi terhadap kritikan dan fikiran alternatif dari masyarakat.

Sebuah kritikan dan pikiran alternatif itu sebagai bentuk dinamika yang terjadi dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. Artinya Pemerintah desa harus menghargai anak-anak bangsa yang mau menunjukkan sedini mungkin kesalahan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan suatu pembangunan, bukan justru merendahkan sebelum kesalahan itu menumbuhkan permasalahan baru yang menghambat laju perkembangan pembangunan serta pembangunan

desa harus dianggap sebagai suatu kewajiban moral dari setiap masyarakat, pemerintah desa harus menghargai dan menghormati asal-usul dan adat istiadat setempat.

2.3.3 Musyawarah Pembangunan Desa

2.3.3.1 Pra Musbang

Untuk memulai suatu perencanaan pembangunan di desa/kelurahan telah dilakukan penyusunan rencana tahap awal melalui musyawarah partisipatif ditingkat dusun/lingkungan untuk merencanakan dan mengatasi masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk menyusun rencana pembangunan yang dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan menumbuhkan pentingnya masyarakat dalam setiap pemberdayaan pembangunan yg telah dirumuskan bersama. Perumusan rencana awal disusun oleh masyarakat sendiri sehingga, tidak perlu tergantung dan orang luar yang tidak mengetahui dengan pasti permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Dengan melihat keadaan tersebut diatas, maka pemerintah desa/kelurahan perlu menyusun strategi untuk mandiri dalam penyusunan rancangan pembangunan desanya dengan:

- a. Melibatkan seluruh warga desa/kelurahan untuk berperan dalam penyusunan rencana pembangunan ditingkat rt/rw, dusun/kelurahan.
- b. Mengikut sertakan warganya untuk mengikuti pelatihan pembangunan desa dengan jalan menyeleksi masyarakat nyayang mempunyai potensi untuk jenis pelatihan yang akan diikuti.

Dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga desa/kelurahan untuk berperan dalam proses penyusunan rencana serta meningkatkan kemampuan dan keterampilannya melalui pelatihan pembagunan desa/kelurahan maka akan memberikan motivasi kepada masyarakatnya untuk berperan serta dalam pembangunan desa/kelurahan. Dengan termotivasinya masyarakat maka kinerjanya diharapkan akan lebih baik dari sebelumnya dan hal ini akan memberikan sumbangan dalam pembahasan rencana ditingkat musbang.

2.3.3.2 Musbang

Kegiatan yang dilakukan dalam musyawarah pembangunan desa/kelurahan ini adalah menindak lanjuti hasil penyusunan rencana dalam pra musbang sehingga diperlukan tenaga perencana yang dapat memilah hasil kajian pra musbang yang sifatnya masih terlalu umum sehingga perlu dibuat skala prioritas, mengingat kebutuhan masyarakat sangat banyak sedangkan dana untuk itu sangat terbatas. Dengan memperhatikan keadaan tersebut diatas maka pemerintah desa/kelurahan perlu mengambil suatu strategi dibidang peningkatan sumber daya manusia. Kendala utama dalam Musbang ini adalah rendahnya kemampuan dan keterampilan para perencana ditingkat desa/kelurahan, sehingga kualitas rencana yang dihasilkan belum dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat, sehingga ditingkat LKM usulan melalui musbang sebagian belum terlansir.

Pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak dilakukan perencanaan dengan baik. Begitupun orang yang ikut terlibat dalam setiap pembangunan. Pembangunan akan terlaksana dengan baik apabila seluruh lapisan aspek masyarakat bekerja sama dengan baik pula, salah satu cara upaya yang ditempuh untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan kepentingan pemerintah adalah salah satunya dengan adanya forum musrembang. Musrembang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah setiap satu tahun sekali dan merupakan salah satu forum yang digunakan untuk membuat suatu perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan pemerintah untuk membahas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya.

2.4. Perencanaan

2.4.1 Definisi Perencanaan

Perencanaan Partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Hal ini seperti yang dikemukakan Sulaiman dalam (Alexander Buditjahjono Gedeona, 2014:72), dimana partisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan adalah:

a. Bentuk Partisipasi

Pada tahap ini bentuk partisipasi masyarakat yang bisa di sumbangkan dalam perencanaan Pembangunan berbentuk tingkat kehadiran, memberikan ide atau gagasan dalam penentuan usulan prioritas. Ide atau gagasan disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan hasil ide-ide tersebut akan diusulkan dalam penetapan usulan. Bentuk partisipasi masyarakat di berikan dalam bentuk sumbangan pikiran, saran, usulan maupun kritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Kewenangan dalam Pengambilan Keputusan

Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting, diskusi intensif antara pihak berkepentingan (*stakeholders*), baik dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing-masing.

c. Metode Pemberian Usulan

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat dan juga berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut maka dilakukan identifikasi dan penetapan permasalahan, menggali dan mengumpulkan masalah-masalah kebutuhan masyarakat.

2.4.2. Perencanaan Pembangunan

Ditinjau dari sejarah perkembangan pembangunan desa di indonesia pada mulanya mempergunakan istilah pembangunan masyarakat (*community development*). Pembangunan masyarakat diartikan sebagai suatu proses, metode, program, kelembagaan dan gerakan yang mencakup:

- a. Mengikut sertakan masyarakat sebagai basis dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi bersama.
- b. Mendidik dan melatih masyarakat dalam proses demokrasi untuk mengatasi masalah secara bersama.
- c. Mengaktifkan kelembagaan serta menyediakan fasilitas untuk transfer teknologi kepada masyarakat.

Pembangunan desa di Indonesia sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesungguhnya sudah dilakukan sejak tahun 1956. Sejak tahun tersebut usaha pembangunan desa diberikan tempat dan perhatian sungguh-sungguh dan menjadi program resmi pemerintahan. Hakikat pengertian pembangunan desa pada waktu itu merupakan suatu gerakan, dimana usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sendiri. Oleh karena itu pembangunan desa di rintikan kepada usaha peningkatan swakarsa dan swadaya masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu kewajiban. Titik berat pendekatannya menadaskan kepada konsep pembangunan masyarakat, yaitu suatu gerakan untuk memajukan kehidupan yang lebih baik dengan partisipasi aktif dan swakarsa masyarakat itu sendiri. Pembangunan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (*undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa*).

Rostow dalam bukunya Minah Sinuhaji Bahan Ajar “Perencanaan dan Pembangunan Wilayah” juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran.

Melihat penjelasan mengenai perencanaan pembangunan tersebut, setiap tahapan dari proses dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan harus diperhatikan secara seksama dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan

membuat suatu perencanaan dengan baik yang dilakukan secara bersama-sama antara seluruh lapisan masyarakat dengan pemerintah akan menumbuhkan adanya rasa saling menghormati dan dapat meningkatkan hubungan kerja sama sehingga terwujud apa yang diinginkan dalam perumusan kebijakan program pembangunan.

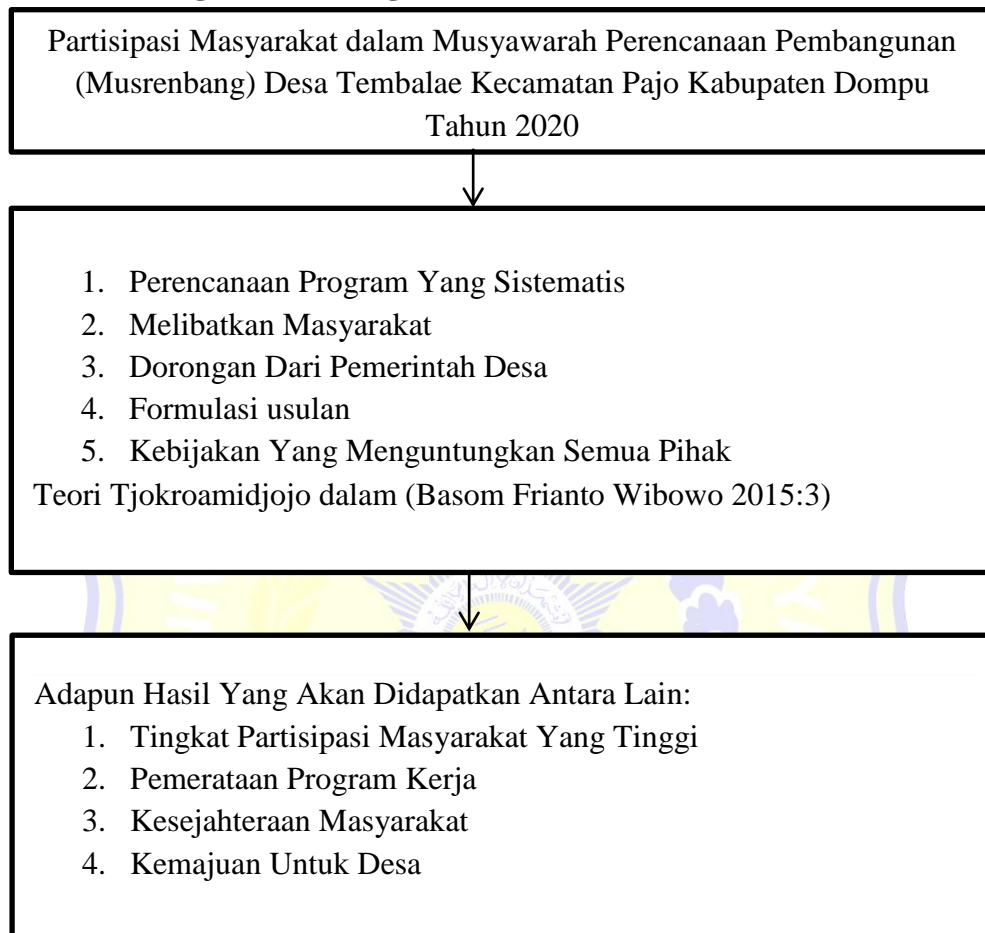
Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat (*people empowering*) terutama di pedesaan. Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan, sebagai program, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, perencanaan pembangunan menjadi penting mengingat sumber-sumber ekonomi yang semakin terbatas dan akan menjadi habis, jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam, tingkat pendidikan dan kemampuan manajerial yang masih rendah. Untuk meningkatkan pembangunan nasional, pemerintah harus membangun negara dengan cara membuat suatu program-program pembangunan yang dapat membangun desa ke arah yang lebih baik.

Pada saat ini, keadaan masyarakat di desa seakan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah dengan masih banyaknya desa yang sampai sekarang belum tersentuh oleh program-program pembangunan yang dapat membawa kehidupan bagi masyarakat desa. Pemerintah di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, telah merencanakan berbagai program pembangunan pedesaan. Program-program pembangunan pedesaan tersebut antara lain terkemas dalam apa yang disebut dengan istilah: (1) pembangunan pertanian (*agricultural development*), (2) industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*), (3) pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*), serta (4) strategi pusat pertumbuhan (*growth centre strategy*). Dari uraian tersebut maka perencanaan pembangunan yang dimaksud penulis adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam forum musyawarah untuk merencanakan program dan menentukan kebijakan agar tercapainya pembangunan

sehingga apa yang kemudian yang menjadi hasil keputusan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

2.5. Kerangka Berfikir

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, keunikan, fenomena untuk menemukan hipotesas (Sugiyano 2018:9). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Proses dan makna (*perspektif subjek*) lebih menonjol dalam penelitian kualitatif.

Menurut Steven Dukeshire dan Jannifer Thurlow dalam (sugiyono,2018:3) metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berkenaan dengan data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan di pecahkan, metode penelitian kualitatif menggunakan fokus grcus group, interview secara mendalam dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data. Metode deskriptif adalah metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada waktu sekarang dengan jalan mengumpulkan, menyusun, menjelaskan, menganalisis dan mengumpulkan data. Dengan demikian hasil penelitian ini nantinya akan dipaparkan data-data yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasari atas pertimbangan yang mendalam agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Lokasi penelitian ini

akan dilaksanakan di desa Tembalae, Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Waktu penelitian ini yang dilakukan peneliti yaitu sejak di berikan izin atau sudah di keluarkan surat izin resmi dari kampus. Adapun kurun waktu yang di tentukan oleh peneliti berkisar dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari, 15 (lima belas) hari untuk pengumpulan data dan 30 (tiga puluh) hari untuk mengolah data dan termasuk penyajian dalam bentuk skripsi maupun dalam proses konsultasi atau melakukan bimbingan skripsi.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif harus perlu diperhatikan penentuan respondennya mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Maka dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif tidak dimaksud bukan untuk membuat secara umum atau generalisasi dari hasil penelitian melainkan lebih menekankan kepada kedalaman informasi yang diperoleh agar dapat memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti dengan penelitian kualitatif maka seorang peneliti membutuhkan informan yang benar-benar mengetahui data atau informasi yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2018;96) bahwa tehnik *purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang ada pada tempat yang sedang diteliti.

Adapun informan yang peneliti tunjuk pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Kepala desa, Sekertaris desa, Ketua BPD dan dua aparat pemerintahan desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu
2. Tokoh-tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang yang ada didesa Tembalae.
3. Tokoh-tokoh pemuda sebanyak 5 orang.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:137). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informen.
2. Data Sekunder adalah sebuah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:137). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari cara pencatatan, pengambilan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer ke data sekunder sebagai pelengkap.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, adapun teknik pengumpulan data yang cocok dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Observasi

Observasi atau pengamatan ialah sebuah kegiatan pencatatan peristiwa secara berurutan. observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi atau *observer* dan objek yang di observasi atau *observer* dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti hanya melihat secara langsung objek tetapi tidak ikut secara langsung . Idrus (2009 :101).

3.5.2 Wawancara

Merupakan Suatu proses interaksi dan komunikasi verbal yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan oleh peneliti. Wawancara juga merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan di jawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tatap muka. Esterberg dalam (Sugiyono, 2018:114)

mendefinisikan wawancara atau interview sebagai berikut, wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informasi yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana sebelum wawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan di ajukan namun pada pelaksanaannya disesuaikan dengan responden, teknik wawancara semi terstruktur jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, didalam pihak yang diajak wawancara atau diminta pendapat serta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen ialah data yang diperoleh untuk menambah data dari wawancara serta observasi pada penelitian, Sugiyono (2018;124). Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya apabila itu didukung oleh dokumen-dokumen penting dan hasil foto pada saat penelitian. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumen ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, didalam kategorisasi,

dilakukan manipulasi serta proses yang sedemikian rupa, sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis. (Haris Hardiansyah, 2010:100).

Dalam penelitian ini merupakan data kualitatif deskriptif, maka analisa yang dilakukan adalah bersifat induktif dan deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dianalisa dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang diteliti. Proses analisa data dimulai dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun observasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan proses panafsiran data. Moleong (dalam Gaffar 2006:190).

Dari uraian diatas, maka proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan, dibaca, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat abstraks, yakni membuat rangkuman yang inti, membuang data yang tidak perlu, mengatur data dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu di jaga agar tetap berada didalamnya, sehingga penarikan kesimpulan (verifikasi) akhir dari penelitian dapat dilakukan dengan mudah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti dari kegiatan observasi yang berupa kata-kata inti harus segera dirangkum agar pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku politik masyarakat tetap terjaga dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Bagong Suyanto dan Sutinah, (2010:70)

2. Penyajian Data

Proses analisis selanjutnya adalah penyajian data yang mengorganisir informasi secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam menggabungkan dan merangkai keterikatan antar data dalam penyusun gambaran proses serta memahami fenomena yang ada pada obyek penelitian. Melalui

penyajian tersebut, telah memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada. Arikanto, Suharsimi (2006:90).

3. Penarikan Kesimpulan

Dari data yang diperoleh dilapangan, peneliti sejak awal mulai menarik kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat pertanyaan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis data terhadap fenomena-fenomena yang ada. Dalam penelitian ini, dapat diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sehingga segera dapat di tarik suatu kesimpulan yang bersifat sementara. Agar kesimpulan itu lebih mantap maka peneliti memperpanjang waktu observasi. Dari observasi tersebut dapat ditemukan data baru yang dapat mengubah kesimpulan sementara, sehingga diperoleh kesimpulan yang mantap.

